



## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH RLPPD KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2023 merupakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada masyarakat mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Minahasa selama tahun 2023 yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Utara. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, RLPPD memuat informasi tentang capaian kinerja makro dan urusan pelayanan dasar, hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan opini atas laporan keuangan tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah serta inovasi daerah. Dalam uraian berikut disampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa selama tahun 2023.

### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro Kabupaten Minahasa Tahun 2023 diukur berdasarkan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,72	78,48	0.98
2	Angka Kemiskinan	7.05	6,87	-2.55
3	Angka Pengangguran	7.00	7,65	9.29
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.47		
5	Pendapatan Per kapita (Rupiah)	58.144.777		
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.308		

Sumber data BPS Kabupaten Minahasa

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Minahasa pemerintahan daerah. Indikator kinerja urusan pemerintahan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui: a) Indikator Kinerja Kunci Keluaran; b) Indikator Kinerja Kunci Hasil; dan c) Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan.

Indikator kinerja kunci (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ada dua jenis IKK yaitu keluaran (output) dan hasil (outcome). Keluaran adalah produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu program atau proyek. Indikator kinerja kunci keluaran digunakan untuk mengukur sejauh mana keluaran suatu program atau proyek telah dicapai.

Sementara itu, hasil adalah perubahan yang dihasilkan oleh program atau proyek terhadap target atau masalah yang ingin diselesaikan. Indikator kinerja kunci hasil digunakan untuk mengukur dampak program atau proyek terhadap masyarakat atau lingkungan.

Dalam menentukan ikk keluaran dan hasil, perlu diperhatikan bahwa kedua jenis ikk ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Keluaran yang baik dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan, sementara hasil yang baik dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan keluaran di masa depan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja harus memperhitungkan kedua jenis ikk ini agar dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang keberhasilan program atau proyek dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian masing-masing indikator kinerja kunci secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1.	Pendidikan	Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (negeri / Swasta)	240	Dinas Pendidikan	
		jumlah peserta didik PAUD (negeri/Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	6649		
		jumlah peserta didik PAUD (negeri/Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6649		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri /Swasta)	809		
		Jumlah pendidik pada PAUD (negeri/Swasta)	307		

		Jumlah pendidik pada PAUD (negeri /Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (s1)bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	191		
		Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri/swasta) yang memiliki ijazah d-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	110		
		Jumlah SD dan SMP negeri terakreditasi	184		
		jumlah peserta didik jenjang SD (negeri/Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	27108		
		jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri/swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	12755		
		Jumlah peserta didik jenjang SD (negeri/Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	27108		
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri/Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12755		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri/swasta)	690		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (negeri/swasta)	809,08		
		Jumlah pendidik pada jenjang SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan sertifikat pendidik	974		
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (negeri/swasta)	1162		
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	340		

# LPPD 2023

		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP (negeri dan swasta)	103		
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD (negeri dan swasta)	2613		
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (negeri dan swasta)	1162		
		Jumlah pendidik pada jenjang SD (negeri dan swasta) yg memiliki ijazah Diploma empat (dIV) atau sarjana dan sertifikasi pendidik	974		
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (negeri dan swasta) yg memiliki ijazah Diploma empat (dIV) atau sarjana dan sertifikasi pendidik	456		
		Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang SD (negeri dan swasta) yang memiliki Ijazah D-IV, S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	340		
		Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang SMP (negeri/swasta) yang memiliki Ijazah D-IV, S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	103		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SD (negeri/swasta) yang memiliki Ijazah SMA/ sederajat	686		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMP (negeri/swasta) yang memiliki Ijazah SMA/ sederajat	209		
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2,43	Dinas Kesehatan	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	100%		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia ( <i>Tablet tambah darah 462.960 Tablet, Makanan tambahan ibu hamil KEK 58.680 bungkus, 44 Termogun digital, 2600 buku KIA</i> )	Cakupan TTD Ibu Hamil sebesar 4022(85,7%), Ibu Hamil KEK mendapat PMT sebanyak 323 ibu, Ibu Hamil	323	

# LPPD 2023

			mendapat buku KIA sebanyak 4692 ibu hamil		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Bidan yang melaksanakan pelayanan Antenatal sebanyak 133 bidan	133	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (139.230 tablet tambah darah dan 9282 kapsul vitamin A)	Cakupan TTD Ibu Hamil sebesar 4022 (85,7)	4022	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah bidan yang melaksanakan pelayanan persalinan (khusus) puskesmas persalinan sebanyak 6 bidan, 6 dokter, 6 perawat		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah puskesmas yang melakukan pertolongan persalinan tahun 2023 6 puskesmas yang ditunjang dengan logistik seperti obat		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	50 Bidan	50	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kapsul vit. A 40068 kapsul, Makanan tambahan balita kurus 82440 bungkus)	Capaian balita yang diberikan Vitamin A sebanyak 15.671 balita, Balita kurus yang mendapat makanan tambahan sebanyak 0 balita		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	113 bidan		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah paket SDITK		

# LPPD 2023

			sebanyak 22 paket ( pengadaan 2021) Antropometri 23 paket, dan HB Strip		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	23 orang bidan dan perawat		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (150 alat posbindu KIT)	22 KIT		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (usia produktif)	72Nakes		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Hipertensi)	1410 Dos		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Hipertensi)	100		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (DM)	100		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (DM)	100		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TB)	100		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HIV)	2 OAT TBC SO,3 OAT TPT dan 6 Non OAT		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (HIV)	73 Nakes		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (Kat 1 = 323paket, Kat 2 =36, Logistik anak 4paket, Pot Sputum 1894, Slide 5 dos)	OAT Kat1= 28 Paket (dosis harian),OAT Kat Anak=5 paket, cartridge=400p cs,PotSPutum= 1304pcs, Reagan Zn=15 paket, Slide=500pcs,l NH 300=758tab,		

# LPPD 2023

			Rifampicin 75g&INH 50g=599tab, Masker=480pc s,Tuberkulin=5 paket		
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (Lansia)	100%		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (lansia)			
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	154	Dinas PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	627.002,52		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	527		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)	14.809,33		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab/kota	-	Tidak ada	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	Tidak ada	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	6.00		
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)	154		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m)	627.002,52		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	527		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi,	14.809,33		

	erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)			
	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab/kota (m)	-	Tidak ada	
	Rencana Teknis tata pengatur air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab/kota	-	Tidak ada	
	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	6		
	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	26,2		
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	13,6		
	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	kewenangan dinas Pertanian		
	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1,00		
	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	-		
	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	1,00		
	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1,00		
	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1		
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	2.204		
	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	-		
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	-		
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa	-		

# LPPD 2023

	penyedotan lumpur tinja			
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-		
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100%		
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	-		
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	-		
	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	100%		
	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	2 unit		
	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	-		
	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	-		
	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-		
	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	1		
	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun Eksisting	467		
	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda No. 3 tahun 2015	1	
	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Keputusan Bupati Minahasa No. 465a thn 2022	Keputusan Bupati Minahasa No. 77 Tahun 2024	
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-		
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-		
	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	1.530		
	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	1.530 unit		

# LPPD 2023

	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	880,42		
	Panjang jalan yang dibangun	-		
	Panjang jembatan yg dibangun	-		
	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	3.368 km		
	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-		
	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	10.556 Km		
	Panjang jembatan yang direhabilitasi	-		
	Panjang jalan yang dipelihara	11.845 Km		
	Panjang jembatan yang dipelihara	111,92 km		
	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1		
	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	67		
	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	330		
	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-		
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1,00	1	
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1,00		
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-		
	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1		

# LPPD 2023

		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	Perbup No. 55	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	1		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	-	Tidak ada	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	-	Tidak ada	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-	Tidak ada	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	110		
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1,00		

		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-		
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	-		
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-		
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-		
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-		
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1,00		
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-		
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1,00		
		Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0		
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas	Perkim
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	45		
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	RT. 29 KK. 29 Jiwa 76		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		

	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0		
	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0		
	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		
	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-		
	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			
	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	375.97		
	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	139		
	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	93.93		
	Jumlah rumah di kab/kota	88.804		
	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	139		
	Jumlah rumah tidak layak huni	9.657		
	Jumlah rumah yang tidak dihuni			
	Rasio rumah dan KK	0.986		
	Jumlah rumah pembangunan baru			
	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	15		

		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1.892		
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	2.094		
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	1.892		
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	1.892		
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	1.892		
		jumlah pengembang yang tersertifikasi	29		
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	29		
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau Pelatihan	0		
5	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang Ditangani	100	Sat-Pol PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2498		
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 perda 1 perkada		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4 orang		
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1 SOP		
		Tersedianya sarana prasarana minimal	1 Paket		
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Tidak ada penyusunan dokumen KRB		
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%		
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada penyusunan dokumen KRB		
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	35%		
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%		
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100%		

	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%		
	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%		
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Tidak ada KLB		
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%		
	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%		
	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%		
	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	100%		
	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	30%		
	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	100%		
	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0%		
	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8 unit		
	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	10 Aparatur		

		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	494		
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0		
		Jumlah rata-rata waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun	9,67 Menit		
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Dinas Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1. Penyandang disabilitas terlantar 120 2. Anak terlantar 250 3. Lanjut usia terlantar 8000 4. Gepeng 100		
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1. Penyandang disabilitas terlantar 117 2. Anak terlantar 239 3. Lanjut usia terlantar 9119 4. Gepeng 101		
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1. Penyandang disabilitas terlantar 52 2. Anak terlantar - 3. Lanjut usia terlantar 532 4. Gepeng -		
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	1. Penyandang disabilitas terlantar 0 2. Anak terlantar 8 3. Lanjut usia terlantar 0		

			4. Gepeng 0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	5		
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2		
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0		
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0		
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	11		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	65		
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	65		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	8		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	2		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	2		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	2		

	usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			
	Jumlah korban bencana yang mendapatkan Makanan	689		
	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0		
	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		
	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		
	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		
	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	14		

## Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 % s/d 99 %	Baik (B)
3.	55 % s/d 74%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 54 %	Kurang (K)

Persentase pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

### Sasaran Meningkatnya Penguatan Investasi

No	Indikator Kinerja (outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	1.000.000.000.000	1.457.156.011.532	145,72%

Sumber : LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Nilai Investasi (juta rupiah) untuk tahun 2023 capaiannya melebihi target yaitu 145,72 %. Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana capaiannya sebesar 273,73 %. Peningkatan nilai investasi karena proses perizinan dilaksanakan secara elektronik dan semua kegiatan usaha yang diproses melalui *online single submission* (OSS) dikategorikan dalam penanaman modal hanya

dibagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non UMK. Untuk Nilai Investasi Tahun 2022 Rp. 6.139.449.056.111- atau sebesar 582,16 % dari target nilai investasi Rp. 900.000.000.000,-. Tahun 2020 sebesar 383,16 % dengan realisasi yang melebihi target, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan dapat dilihat dari realisasi 3,8 T dengan capaian 885 % yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sesuai data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

Dapat dilihat pada table di bawah ini jumlah investor berskala Nasional dan juga jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) sebagai berikut :

### **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

No	Indikator Kinerja (outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda	WTP	Sementara Audit	0%
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A	B	77,01 %
3	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi	Sementara Penyusunan	0%

Sumber No. 1 : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa

Sumber No. 2 : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa

Sumber No. 3 : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa

Capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ditunjang oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja yang pertama adalah indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) Tahun 2022 sebesar 0 % karena sampai laporan kinerja ini dibuat masih dalam tahap audit BPK. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
2. Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
3. Tidak Wajar (adversed opinion)
4. Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion)

Prestasi membanggakan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan keuangan selama 9 (Sembilan) tahun berurut-urut meraih predikat BPK WTP sejak tahun 2014 hingga tahun 2022.



Untuk Indikator Kinerja yang kedua, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Kementerian PAN RB berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 sesuai dengan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Minahasa mendapat Nilai 61,61 dengan predikat B. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dapat dilihat dari nilai-nilai di tahun sebelum- sebelumnya. Untuk tahun 2022 Kabupaten Minahasa mendapat Predikat B dengan Nilai 60,94. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Kabupaten Minahasa telah mendapat predikat B selama 3 tahun berturut-turut. Sedangkan Tahun 2021 hasil penilaian dari Kemenpan dan RB mendapat Nilai B. Tahun 2020, Kabupaten Minahasa mendapat Nilai B dengan nilai 60,16, meningkat dari tahun 2019.

### Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
<b>Pendapatan :</b>	<b>1.255.663.461.685,00</b>	<b>1.267.408.261.170,14</b>	<b>100,94</b>
<b>a. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>94.508.891.289,00</b>	<b>107.290.576.523,14</b>	<b>113,52</b>
Pendapatan Pajak Daerah	46.548.928.500,00	49.302.214.244,82	105,91

# LPPD 2023

Pendapatan Retribusi Daerah	4.968.157.000,00	2.812.150.600,00	56,60
Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	4.828.041.413,00	4.828.041.413,00	100
Lain-lain Pendapatan yang Sah	38.163.764.376,00	50.348.170.265,32	131,93
<b>b. Pendapatan Transfer</b>	<b>1.137.890.473.000,00</b>	<b>1.141.743.180.459,00</b>	<b>100,34</b>
Pendapatan Transfer dana Perimbangan			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	1.071.990.473.000,00	1.074.175.052.599,00	100,20
Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.900.000.000,00	67.568.127.860,00	102,53
<b>c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>23.264.097.396,00</b>	<b>18.374.504.188,00</b>	<b>78,98</b>
Pendapatan Hibah	4.000.000.000,00	4.936.985.317,00	123,42
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.264.097.396,00	13.437.518.871,00	69,75
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>1.255.663.461.685,00</b>	<b>1.267.408.261.170,14</b>	<b>100,94</b>

Belanja Daerah sesuai amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

## Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
<b>Belanja Daerah :</b>	<b>1.363.896.715.729,00</b>	<b>1.194.429.763.847,00</b>	<b>87,57</b>
<b>a. Belanja Operasi</b>	<b>962.227.895.985,00</b>	<b>812.872.677.793,00</b>	<b>84,48</b>
Belanja Pegawai	533.584.388.484,00	466.805.308.315,00	<b>87,48</b>

# LPPD 2023

Belanja Barang dan Jasa	353.889.306.174,00	304.009.504.706,00	<b>85,91</b>
Belanja Bunga	10.159.563.327,00	9.748.088.322,00	<b>95,95</b>
Belanja Hibah	62.159.888.000,00	29.875.588.000,00	<b>48,06</b>
Belanja Bantuan Sosial	2.434.750.000,00	2.434.188.450,00	<b>99,98</b>
<b>b. Belanja Modal</b>	<b>130.018.306.610,-</b>	<b>121.245.460.447,00</b>	<b>93,25</b>
Belanja Modal Tanah	222.918.080,-	222.918.080,00	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.324.055.140,-	26.306.648.128,00	<b>89,71</b>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.834.479.901,-	76.494.439.745,00	<b>95,82</b>
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.851.156.492,-	18.212.204.494,00	<b>96,61</b>
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.785.286.997,-	9.250.000,00	<b>0,52</b>
<b>c. Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.526.592.507,-</b>	<b>4.767.000.000,00</b>	<b>30,70</b>
<b>d. Belanja Transfer</b>	<b>256.123.560.627,-</b>	<b>255.544.625.607,00</b>	<b>99,77</b>
Belanja Bagi Hasil	5.043.366.412,-	4.723.315.342,00	<b>93,65</b>
Belanja Bantuan Keuangan	251.080.194.215,-	250.821.310.265,00	<b>99,90</b>
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1.363.896.715.729,00</b>	<b>1.194.429.763.847,00</b>	<b>87,57</b>

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disebut dengan pembiayaan netto.

**Tabel f.2**

# LPPD 2023

## Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
<b>Pembiayaan :</b>			
<b>a. Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>169.108.429.208,00</b>	<b>167.901.963.512,00</b>	<b>99,29</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	134.437.429.208,00	134.437.429.206,00	100
Penerimaan Pinjaman Daerah	34.671.000.000,00	33.464.534.306,00	<b>96,52</b>
<b>b. Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>61.000.000.000</b>	<b>57.936.152.167,00</b>	<b>94,98</b>
Penyertaan Modal Daerah	24.999.999.555,00	12.337.408.266,00	<b>49,35</b>
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	60.000.000.000,00	57.936.152.167,00	<b>96,56</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>108.108.429.208</b>	<b>109.965.811.345,00</b>	<b>101,72</b>

Demikian Ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 ini disampaikan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga agar masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa selama tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Minahasa sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membrikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minhasa dan terus bertekad untuk dapat melaksanakan yang terbaik ke depan demi terwujudnya Minahasa yang semakin maju dan semakin hebat. Karena itu saran dan masukan dari seluruh masyarakat demi kemajuan ke depan sangat diharapkan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai pengabdian kita bagi bangsa dan negara di tanah Minahasa tercinta guna mewujudkan Kabupaten Minahasa yang maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera.

**Terima Kasih, Tuhan Memberkati Minahasa.**

**Pakatuan Wo Pakalawiren.**

**Pj. BUPATI MINAHASA,**

**Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, M.Si**

**i jayat u santi**